



Kemunduran Demokrasi di Asia Tenggara: Analisis Fenomena *Authoritarian Backsliding* di Indonesia dan Thailand

Ria Amelia^{1*}, Elly Nurli², Amealiea Prihatiningsih Malandy's³, Azalia Salsabila⁴, Siti
Alya Aryanti⁵

¹⁻⁵Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis korespondensi: ria.ameliaaa08@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the phenomenon of authoritarian backsliding or democratic regression in Southeast Asia, focusing on Indonesia and Thailand. Conceptually, backsliding refers to the gradual weakening of democracy through formal and legal mechanisms by political actors within the system itself. The research employs a literature study method, analyzing academic sources and international reports relevant to the topic. The findings indicate that both Indonesia and Thailand have experienced democratic decline characterized by the consolidation of executive power, the weakening of oversight institutions, and restrictions on civil liberties. In Indonesia, democratic regression occurs primarily through executive aggrandizement and strategic manipulation of elections, while in Thailand, it manifests through promissory coups under military dominance. The study concludes that democratic decline in Southeast Asia often occurs not through overt authoritarian takeovers but through a subtle erosion of democratic institutions that undermines popular sovereignty.*

Keywords: *authoritarian backsliding; democracy; Indonesia; Thailand; civil liberties.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *authoritarian backsliding* atau kemunduran demokrasi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, dengan fokus utama pada dua negara yakni Indonesia dan Thailand. Secara konseptual, *backsliding* menggambarkan proses pelemahan demokrasi yang terjadi secara bertahap melalui mekanisme formal dan legal oleh aktor politik dari dalam sistem itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber akademik dan laporan lembaga internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Thailand mengalami kemunduran demokrasi yang ditandai dengan penguatan kekuasaan eksekutif, pelemahan lembaga pengawasan, serta pembatasan kebebasan sipil. Di Indonesia, kemunduran demokrasi cenderung terjadi melalui mekanisme dan *executive aggrandizement* dan *strategic manipulation of elections*, sedangkan di Thailand, fenomena ini muncul dalam bentuk *promissory coups* di bawah dominasi militer. Temuan ini menegaskan bahwa kemunduran demokrasi di Asia Tenggara tidak selalu berlangsung secara radikal, melainkan secara perlahan melalui institusi formal yang melemahkan esensi kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: *authoritarian backsliding; demokrasi, Indonesia; Thailand; kebebasan sipil.*

1. LATAR BELAKANG

Sistem Demokrasi merupakan bagian penting dalam negara yang menganut Prinsip pemerintahan oleh rakyat. Namun yang terjadi saat ini demokrasi bukan lagi menjadi nilai yang dipegang teguh tapi justru menjadi paradoks besar dan hanya sebagai sistem formalitas biasa untuk meraih simpati masyarakat. Demokrasi merupakan elemen penting di beberapa negara salah satunya Adalah Indonesia dan Thailand. Lebih dari dua dekade setelah bergulirnya era reformasi, demokrasi di Indonesia masih berada pada tahap pencarian bentuk idealnya (Azizzah, 2023). Alih-alih mencapai stabilitas dan kematangan yang diharapkan, justru muncul indikasi kemunduran dalam praktik-praktik demokrasi di lapangan (Alvian, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berakar kuat dalam budaya politik dan struktur institusional bangsa.

Fenomena kemunduran demokrasi ini tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari lemahnya institusi politik, tetapi juga karena adanya restrukturisasi kekuasaan di tingkat sosial dan ekonomi (Ramadhan & Masykuri, 2021). Di Thailand, misalnya, kemunduran demokrasi berlangsung melalui mekanisme military monarchy alliance yang secara sistematis menundukkan lembaga sipil di bawah kontrol junta militer. Chambers dan Waitoolkiat (2021) menunjukkan bahwa kudeta 2014 bukan sekadar peristiwa politik, tetapi bagian dari praetorian cycle siklus di mana militer menguasai pemerintahan setiap kali terjadi instabilitas sipil. Selain itu, Sombatpoonsiri (2020) memperkenalkan konsep Authoritarian Civil Society (ACS) untuk menggambarkan peran aktif masyarakat sipil konservatif dalam mendukung kebijakan otoriter melalui mobilisasi anti-demokrasi dan kampanye moralitas politik. Dari kedua negara tersebut dapat kita lihat bahwa sistem demokrasi pada akhirnya hanya menjadi formalitas biasa karena pada implementasinya sistem tersebut hanya menjadi tirai yang menutupi Tindakan-tindakan yang melemahkan sistem demokrasi itu sendiri.

Secara konseptual, demokrasi sejak awal dimaknai sebagai sistem politik yang menempatkan rakyat (demos) sebagai sumber utama kedaulatan dan kekuasaan (Kebung, 1997). Dalam sistem ini, seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam menentukan arah pemerintahan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun golongan. Hal ini menandai perbedaan mendasar antara demokrasi dengan bentuk pemerintahan seperti monarki atau oligarki, di mana kekuasaan hanya berpusat pada segelintir elit yang memiliki privilese ekonomi atau keturunan (Aspinall & Warburton, 2017).

Lebih jauh, demokrasi menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam proses pengambilan keputusan publik, serta menjamin kesetaraan akses terhadap ruang partisipasi politik (P. B. Kleden, 2008). Dengan demikian, esensi demokrasi tidak sekadar terletak pada mekanisme pemilihan umum, melainkan juga pada sejauh mana aspirasi rakyat benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan (Aspinall & Warburton, 2017).

Sebagaimana ditegaskan oleh Wattimena (2016), prinsip utama demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Artinya, legitimasi kekuasaan bergantung pada pengawasan publik serta akuntabilitas para pemimpin terhadap konstituen yang mereka wakili. Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer, prinsip tersebut seringkali tereduksi menjadi slogan normatif yang tidak diikuti oleh praktik nyata. Banyak kebijakan publik yang masih lebih mencerminkan kepentingan elit politik daripada kebutuhan masyarakat luas. Namun, Secara Implementasi yang terjadi beberapa tahun terakhir di Asia Tenggara sedang mengalami kemunduran demokrasi, Tren kemunduran demokrasi ini dapat dilihat pada gambar indeks demokrasi di bawah ini



Sumber: (Freedom House, 2020)

Gambar 1. Indeks Demokrasi di Asia Tenggara.

Dua dekade terakhir, Asia Tenggara menunjukkan dinamika politik yang kompleks dan paradoksal. Negara-negara yang sebelumnya menjadi simbol transisi demokrasi seperti Indonesia pasca Reformasi 1998 dan Thailand pasca 1992 kini justru menampilkan gejala kemunduran demokrasi (*authoritarian backsliding*) (Harefa et al., 2024). Gambar tersebut menjelaskan bahwa Indonesia dan Thailand terus mengalami adanya kemunduran demokrasi, Hal ini terjadi karena adanya pembatasan kebebasan pers dan permasalahan lain dalam badan pemerintahan seperti oligarki dan manipulasi-manipulasi lainnya. Freedom House (2014) menilai bahwa kemerosotan demokrasi di Indonesia antara lain disebabkan oleh munculnya regulasi yang bersifat ambigu dan multitafsir. Peraturan yang sering dijuluki sebagai pasal karet ini mencakup pelarangan terhadap “ujaran kebencian”, “anti-Pancasila”, maupun “antipemerintah” (Azizzah, 2023). Dalam praktiknya, kebijakan tersebut berisiko dijadikan alat politik dan dapat mengekang kebebasan berekspresi serta kebebasan media. Adapun Thailand tercatat mengalami kemerosotan dalam indeks kebebasan, di mana sejak tahun 2014 statusnya berubah menjadi tidak bebas (*not free*).

Data dari Varieties of Democracy (V-Dem) Institute (2024) menunjukkan bahwa sejak tahun 2013, hampir seluruh negara di Asia Tenggara mengalami penurunan skor demokrasi. Thailand, Kamboja, dan Myanmar dikategorikan sebagai *electoral autocracies*, sedangkan Indonesia yang sebelumnya dianggap “ikon demokrasi pasca-otoritarianisme” turun dari status *liberal democracy* menjadi *electoral democracy* (Croissant & Voelkel, 2020).

Negara	Status Kebebasan (Tahun)											Tren
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Indonesia	F	F	F	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Menurun
Malaysia	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Filipina	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Singapura	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	Stagnan
Thailand	PF	PF	PF	PF	NF	NF	NF	NF	NF	PF	NF	Menurun
Timor Leste	PF	PF	PF	PF	PF	PF	PF	F	F	F	F	Meningkat

Sumber: (Freedom House, 2020)

Gambar 2. Perkembangan Status Kebebasan Enam Negara 2010-2020.

Menurut laporan Freedom House (2024), skor kebebasan politik Indonesia menurun dari 65/100 pada 2016 menjadi 59/100 pada 2024, sementara Thailand hanya mencatat 30/100, menandakan sistem yang lebih tertutup dan terkendali oleh kekuasaan militer (Thompson, 2016). Kondisi ini mencerminkan fenomena yang oleh Nancy Bermeo (2016) disebut sebagai *authoritarian backsliding*, yaitu kemerosotan bertahap demokrasi melalui mekanisme formal dan legal yang dijalankan oleh aktor-aktor politik dari dalam sistem itu sendiri bukan melalui kudeta langsung (Bermeo, 2016).

Permasalahan ini pada akhirnya memunculkan paradoks yang sangat besar berkaitan dengan sistem demokrasi yang saat ini merosotnya bukan dilihat secara nyata melalui kudeta tetapi di era saat ini justru kemunduran demokrasi banyak sekali tidak disadari karena mereka banyak sekali memanfaatkan retorika nasionalisme dan moralitas dalam membungkus kemunduran demokrasi. maka penelitian ini sangat penting dan urgent untuk mengetahui kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia dan Thailand Seperti dikemukakan Bermeo (2016), kemunduran demokrasi modern seringkali berlangsung secara legalistik dan elektoral.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori *Authoritarian Backsliding*

Beberapa tahun terakhir wilayah asia Tenggara mengalami adanya permasalahan besar berkaitan dengan kemunduran demokrasi di beberapa negara salah satu yang paling spesifik penurunannya Adalah Indonesia dan Thailand. Penurunan demokrasi ini tidak terjadi secara langsung tetapi secara perlahan melalui internal sistem demokrasi itu sendiri. kemunduran demokrasi yang terjadi di kedua negara tersebut terjadi secara perlahan dan bertahap bahkan cenderung banyak tidak disadari oleh masyarakat karena bersifat legalistic.

Di zaman dahulu kemunduran demokrasi terjadi secara terang-terangan, spontan dan langsung melalui kudeta Militer dan bentuk pemerintahan yang sentralistik. Namun saat ini kemunduran demokrasi bukan lagi secara perubahan yang terang-terangan tetapi secara

perlahan menggerogoti sistem demokrasi itu sendiri (Bermeo, 2016). Hal ini selaras dengan pendapat dari Nancy Bermeo (2016) dalam artikelnya *On Democratic Backsliding*. Menurut Bermeo kemunduran demokrasi saat ini bukan lagi melalui *Democratic Breakdown* yang terjadi secara terang-terangan dan spontan, tetapi di era kontemporer ini kemunduran demokrasi terjadi melalui cara halus dimana pemimpin terpilih secara demokratis secara perlahan melemahkan institusi dan norma demokrasi. Dengan demikian, *backsliding* merupakan bentuk “autokratisasi dari dalam,” bukan “kudeta dari luar.”

Hal ini juga selaras dengan pendapat Levitsky dan Way (2010) yang menjelaskan bahwa yang terjadi saat ini Adalah *Competitive Authoritarianism* yaitu suatu keadaan yang menggambarkan bahwa adanya institusi demokrasi dalam suatu negara dipertahankan secara formal melalui pemilu, pembentukan partai, dan diskusi terbuka lain (Bermeo, 2016). Namun, secara Tidak langsung bagian dari instansi yang menegakan demokrasi tersebut cenderung memanfaatkan kontestasi demokrasi seperti pemilu sebagai ajang pembelian suara melalui Tindakan yang mencederai demokrasi itu sendiri bahkan lebih ekstrim lagi mereka melakukan Tindakan seperti memanfaatkan kekayaan negara sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, kedudukan melalui manipulasi hukum dan Tindakan -tindakan lainnya seperti korupsi.

Terdapat beberapa karakteristik dari *Authoritarian Backsliding* yang dikemukakan oleh Borneo (2016) yang menjadi salah satu tanda utama negara sedang mengalami *Authoritarian Backsliding* yakni:

Kemunduran demokrasi yang terjadi dilakukan oleh actor demokrasi itu sendiri bukan dari kekuatan lain seperti kekuatan eksternal maupun militer.

Kemunduran yang terjadi sifatnya *legalistic* karena terjadi pada sistem atau elemen penting demokrasi itu sendiri seperti melalui pemilu, konstitusi dan pengendalian Lembaga.

Didukung oleh retorika penguatan dan kemajuan demokrasi dengan alasan menjaga stabilitas, efisiensi dan kebebasan.

Karakteristik ini sudah cukup menggambarkan bahwa jenis kemunduran demokrasi ini merupakan kemunduran secara halus dan bertahap dengan retorika kekuatan demokrasi dan penguatan sistem pemerintahan yang tanpa kita sadari justru memperkuat kuasa dan kewenangan pemerintah untuk mengendalikan seluruh elemen negara.

Bermeo menjelaskan bahwa terdapat 3 mekanisme kemunduran demokrasi yakni terdiri dari:

Promissory Coups, indikator ini menggambarkan bahwa kemunduran demokrasi terjadi secara kudeta yang di klaim secara “sementara” untuk dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan negara dan menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan. Namun pada akhirnya sementara ini melahirkan kekuasaan nin demokrasi dalam negara dan mencederai sistem demokrasi karena membatasi berbagai hal yang seharusnya ada dalam negara demokrasi salah satunya adalah kebebasan pers.

Executive Aggrandizement, kemunduran demokrasi jenis ini ditandai dengan penguatan kekuasaan eksekutif dengan melemahkan Lembaga-Lembaga pengawasan, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal.

Strategic Manipulation of Elections, kemunduran demokrasi ini tidak terlihat secara langsung karena melalui manipulasi elemen penting demokrasi yakni pemilu. Dalam jenis ini pemilih tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsipnya. Namun yang terjadi prinsip tersebut hanya retorika belaka, karena pada implementasinya pemilu tidak lagi menjadi elemen demokrasi tetapi dijadikan alat manipulasi dan intervensi melalui berbagai Tindakan seperti jual beli suara, penggunaan sumberdaya negara, bahkan melalui manipulasi konstitusi.

Teori authoritarian backsliding memberikan kerangka analitis penting untuk memahami krisis demokrasi di Asia Tenggara. Dengan menekankan pada proses gradual, legal, dan institusional, teori ini menjelaskan mengapa demokrasi dapat melemah tanpa kehilangan bentuknya secara formal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena isu kemunduran demokrasi (authoritarian backsliding) merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang telah ada. Studi literatur memungkinkan peneliti menelusuri berbagai perspektif teoretis, temuan empiris, serta fakta historis yang relevan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dan Thailand. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga riset, serta publikasi resmi dari organisasi internasional seperti Freedom House dan V-Dem Institute.

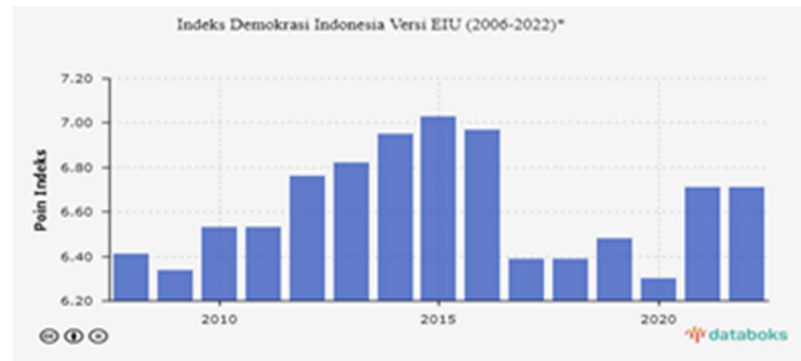
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami permasalahan besar berkaitan dengan sistem pemerintahan yakni sistem demokrasi. Pasca-Reformasi 1998, Indonesia kerap dipuji sebagai kisah sukses demokratisasi di dunia berkembang (Jati, 2021). Namun, setelah lebih dari dua dekade, arah perkembangan politik Indonesia menunjukkan tanda-tanda kemunduran serius. Demokrasi Indonesia kini menghadapi ancaman dari dua sisi: pelemahan lembaga demokratis dan dominasi oligarki politik-ekonomi (Aspinall & Warburton, 2017).

Selama sepuluh tahun terakhir, kualitas demokrasi di Indonesia menunjukkan kemunduran yang cukup signifikan (Jati, 2021). Kondisi ini menarik perhatian dunia internasional karena menjadi tanda bahwa semakin banyak negara mengalami kesulitan dalam mempertahankan sistem demokrasi yang sehat (Sofian & Firman, 2025). Situasi tersebut semakin terbukti setelah terbitnya laporan demokrasi dari V-Dem Institute tahun 2024, yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara otokrasi elektoral (Febriandy & Wahid, 2024). Dengan hasil tersebut, posisi Indonesia pun berubah dari sebelumnya tergolong sebagai negara demokrasi elektoral menjadi otokrasi elektoral. Kemerosotan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, penurunan kualitas dalam proses pemilihan umum, maraknya praktik politik uang, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat (Hilmy, 2020).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia adalah menurunnya tingkat kebebasan sipil. Sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi kini semakin tertekan akibat kebijakan pemerintah yang cenderung membatasi ruang gerak media serta menekan kelompok-kelompok dengan pandangan kritis (Sara et al., 2024). Fenomena ini tampak jelas di Indonesia, meskipun bukan hanya negara ini yang mengalaminya. Indonesia mencerminkan tren global di mana kebebasan sipil di berbagai negara mengalami penurunan yang cukup signifikan (Sofian & Firman, 2025).

Penurunan tersebut juga terlihat dari laporan Freedom House, yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2013, status kebebasan di Indonesia turun dari kategori “bebas (free)” menjadi “bebas sebagian (partly free)”. Laporan Freedom House (2014) menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama kemunduran demokrasi ini adalah munculnya berbagai regulasi yang bersifat kabur dan dapat ditafsirkan ganda, yang sering disebut sebagai “pasal karet” (Nurohman et al., 2024).



Sumber: (Databoks, 2024)

Gambar 3. Indeks Demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan data di atas menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini cenderung mengalami penurunan dan yang paling signifikan adalah pada tahun 2019-2020, hal ini banyak terjadi karena pemerintah mulai tidak melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan Keputusan. Dampak yang terjadi adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena kebijakan yang dibuat banyak tidak mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas (Aspinall & Warburton, 2017).

Fenomena *Authoritarian Backsliding* di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi mengalami perkembangan yang cukup pesat berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sejak masa orde baru yang menekankan kontrol pusat atau sentralistik. Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan merespon tuntutan dari masyarakat mengenai kebebasan (Budiatri et al., 2024). Namun, pada implementasinya demokrasi di Indonesia tercipta sebagai paradoks besar dan hanya menjadi retorika belaka karena pada akhirnya masyarakat tetap menjadi aktor paling kecil dalam sistem pemerintahan. Sistem demokrasi di Indonesia tidak disertai dengan konsep demokratisasi bernegara (Aspinall & Warburton, 2017).

Hal ini terbukti dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan berkaitan dengan sistem demokrasi. Sejak tahun 2014 demokrasi di Indonesia terus mengalami penurunan signifikan ditandai dengan pembuatan kebijakan dan aturan yang pada akhirnya melemahkan kontrol masyarakat terhadap pemerintah (Aspinall & Warburton, 2017). Pelemahan lembaga pengawas menjadi indikator nyata *backsliding* di Indonesia. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019 menjadikan lembaga tersebut berada di bawah kendali eksekutif. Menurut Mietzner (2020), langkah ini merupakan salah satu titik balik terpenting dalam proses autokratisasi di Indonesia karena menghapus independensi lembaga antikorupsi yang sebelumnya menjadi simbol reformasi (Dori et al., 2025).

Selain itu, lahirnya kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu indikator nyata kemunduran demokrasi di Indonesia. Beberapa pasal dalam UU tersebut dinilai sebagai “pasal karet” karena memiliki tafsir yang tidak jelas dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masa depan kebebasan sipil, khususnya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang public (Dori et al., 2025)

Dalam praktiknya, UU ITE kerap dijadikan alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun pihak-pihak berkuasa. Alih-alih menjadi instrumen hukum yang melindungi masyarakat dari kejahatan digital, regulasi ini justru sering digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara yang menyampaikan pendapatnya secara terbuka di media sosial maupun media massa (Ambarita et al., 2025). Akibatnya, muncul iklim ketakutan (*chilling effect*) yang menyebabkan masyarakat enggan mengekspresikan pandangan kritisnya terhadap kebijakan publik. Kebebasan sipil juga menunjukkan tren negatif. Berdasarkan Reporters Without Borders (2024), Indonesia menempati peringkat 111 dari 180 negara dalam World Press Freedom Index, turun dari peringkat 96 pada 2017. Lebih dari 20 jurnalis dan aktivis dijerat UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hanya karena mengkritik kebijakan pemerintah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rezim demokratis dapat membatasi kebebasan berpendapat tanpa harus menggunakan represi fisik seperti pada masa Orde Baru.

Bukan hanya itu kebijakan lain yang mendukung pelemahan demokrasi juga dilakukan secara legal salah satunya Adalah pelemahan sistem peradilan yang kasusnya Viral pada tahun 2023 Kasus mengenai nepotisme dan dominasi kekuasaan yang menjadi trending topik berita di Indonesia, kasus Gibran yang dicanangkan menjadi cawapres (Ambarita et al., 2025. Namun, belum memenuhi syarat umur sebagai cawapres sehingga mengajukan gugatan kepada Mahkamah konstitusi (MK), dan yang menjadi kejanggalan adalah keputusan mahkamah konstitusi (MK) yang diputuskan secara tiba tiba padahal ada beberapa hakim yang tidak menyetujui terkait perubahan mengenai penambahan opsi ketentuan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan individu yang belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

Aturan ini akan mulai berlaku pada pemilihan presiden tahun 2024. Dengan keputusan ini tentunya memunculkan berbagai spekulasi dan dugaan dari masyarakat mengenai adanya praktik nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh

keluarga Jokowi. Hal ini tentunya membuat masyarakat gundah dan khawatir terhadap kondisi pemerintahan di Indonesia dikarenakan sekarang mahkamah konstitusi tidak mencerminkan tugasnya sebagai penegak keadilan. kasus ini mencerminkan jelas adanya kemunduran demokrasi di Indonesia pasalnya kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya justru melenggangkan dominasi politik dan politik dinasti di Indonesia (Ambarita et al., 2025). Jika kita lihat masih banyak sekali aturan-aturan yang melemahkan demokrasi seperti Undang-undang cipta kerja, Undang undang TNI dan undang-undang lainnya.

Permasalahan Ini sangat menggambarkan terjadinya kemunduran demokrasi atau *Authoritarian Backsliding* yang dikemukakan oleh Bermeo. Di Indonesia jenis kemunduran demokrasinya Adalah Executive Aggrandizement, kemunduran demokrasi jenis ini ditandai dengan penguatan kekuasaan eksekutif dengan melemahkan lembaga-lembaga pengawasan, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal. Selain itu jenis kemunduran demokrasi di Indonesia juga jenis *Strategic Manipulation of Elections*, kemunduran demokrasi ini tidak terlihat secara langsung karena melalui manipulasi elemen penting demokrasi yakni pemilu. Dalam jenis ini pemilih tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan prinsipnya. namun yang terjadi prinsip tersebut hanya retorika belaka, karena pada implementasinya pemilu tidak lagi menjadi elemen demokrasi tetapi dijadikan alat manipulasi dan intervensi melalui berbagai Tindakan seperti jual beli suara, penggunaan sumberdaya negara, bahkan melalui manipulasi konstitusi.

Indonesia merupakan negara yang memiliki indeks politik uang tertinggi ketiga hal ini diperkuat oleh pernyataan Profesor Burhanuddin Muhtadi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia saat ini termasuk dalam daftar negara-negara dengan tingkat praktik politik uang paling tinggi dalam penyelenggaraan pemilu. Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa dari total 187 juta pemilih yang terdaftar, sekitar 62 juta orang mengaku terlibat dalam praktik jual beli suara pada Pilpres 2014 dan 2019. Data ini menjadi temuan utama dalam risetnya yang berjudul 'Votes for Sale' (Culiah & Dermawan, 2022). Pilar utama demokrasi kini semakin terkooptasi oleh kepentingan oligarki. Berdasarkan penelitian Winters (2019), sekitar 80% anggota DPR RI periode 2019–2024 memiliki keterkaitan langsung dengan jaringan bisnis besar atau dinasti politik. Fenomena ini menegaskan bahwa kekuasaan di Indonesia berputar di tangan segelintir elite yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik secara bersamaan (Sihidi, 2025).

Di tingkat lokal, Center for Strategic and International Studies (CSIS, 2023) mencatat bahwa lebih dari 117 kepala daerah berasal dari dinasti politik yang sama, menunjukkan kecenderungan oligarki elektoral semakin kuat (Ambarita et al., 2025). Dalam konteks ini,

pemilu hanya menjadi arena kompetisi antar-elite, bukan representasi rakyat yang sesungguhnya. Demokrasi Indonesia, dengan demikian, mengalami transformasi menjadi procedural democracy yang kehilangan substansinya (Dori et al., 2025).

Kasus Thailand: Demokrasi di Bawah Bayang Militerisme

Thailand sebagai negara demokrasi juga mengalami hal serupa seperti Indonesia yaitu kemunduran demokrasi, Bahkan indeks demokrasi di Thailand cenderung lebih rendah dibanding Indonesia (Lubis & Zamharir, 2024). hal ini terjadi karena beberapa dampak seperti kebebasan pers yang sangat diBatasi. Hal ini mencerminkan bahwa Thailand merupakan contoh nyata dan ekstrem dari authoritarian backsliding yang berbasis militer. Sejak kudeta 2014, junta militer Thailand berhasil membangun sistem politik yang tampak demokratis tetapi secara struktural dikontrol oleh militer (Nethipo, 2019). Konstitusi 2017 yang disusun di bawah kendali junta memungkinkan 250 anggota Senat ditunjuk langsung oleh militer, memberikan mereka hak veto dalam pemilihan perdana menteri dan pembuatan undang-undang.

Fakta ini kemudian didukung oleh data yang dikemukakan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) yang menjelaskan bahwa Thailand mengalami cacat demokrasi yang sangat signifikan akibat dari tindakan-tindakan militer yang mencederai demokrasi salah satunya Adalah kontrol militer dalam semua bidang pemerintahan (Lubis & Zamharir, 2024). Meskipun Thailand mengadakan pemilihan umum tahun 2023, proses politiknya dianggap tidak sepenuhnya bebas dan adil karena intervensi lembaga non-demokratis, seperti Mahkamah Konstitusi dan Senat yang ditunjuk militer. Kegagalan partai *Move Forward* (partai prodemokrasi pemenang pemilu) untuk membentuk pemerintahan menjadi contoh nyata lemahnya institusi demokrasi. Bahkan EIU mengkategorikan Thailand sebagai bentuk pemerintahan Rezim Hibrida bukan sebagai sistem pemerintah demokrasi (Lubis & Zamharir, 2024).



Sumber: (Bangkok Post, 2024)

Gambar 4. Indeks demokrasi di seluruh Di Beberapa Negara.

Data Economist Intelligence Unit (2023) menempatkan Thailand dalam kategori hybrid regime dengan skor 4.35, menurun dari 5.77 pada 2012. V-Dem (2024) juga mencatat penurunan drastis indeks Liberal Democracy dari 0.35 pada 2012 menjadi 0.15 pada 2023 (Lubis & Zamharir, 2024). Penurunan ini memperlihatkan konsistensi kontrol militer terhadap politik sipil melalui instrumen hukum dan kelembagaan (Harrison, 2022). Militer Thailand tidak hanya mengontrol politik, tetapi juga media dan opini publik. Human Rights Watch (2024) melaporkan bahwa lebih dari 250 aktivis pro-demokrasi dijerat dengan pasal lèse-majesté (penghinaan terhadap kerajaan) sejak 2019 (Carolinna et al., 2022). Kasus paling mencolok terjadi pada 2023 ketika partai reformis Move Forward Party, yang memenangkan suara rakyat terbanyak, digagalkan untuk membentuk pemerintahan karena veto dari Senat yang didominasi militer (Djuyandi, 2023). Kejadian ini menunjukkan bagaimana militer memanfaatkan prosedur demokrasi untuk mempertahankan kekuasaan (Harrison, 2022).

Selain intervensi politik langsung, Thailand juga menggunakan kontrol sosial untuk menekan oposisi. Menurut Freedom House (2024), skor kebebasan sipil Thailand hanya 10/40, menunjukkan ruang kebebasan publik yang sangat terbatas (Djuyandi, 2023). Aktivis mahasiswa seperti Panusaya Sithijirawattanakul dan Parit Chiwarak menjadi simbol perjuangan melawan represi negara, namun keduanya berulang kali ditangkap dengan tuduhan mengancam stabilitas Kerajaan (Lubis & Zamharir, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa backsliding di Thailand tidak hanya bersifat politik, tetapi juga

sosial dan ideologis karena memanfaatkan simbol monarki sebagai legitimasi represi (Carolinna et al., 2022).

Dari fenomena tersebut dapat kita analisis bahwa bentuk Backsliding yang terjadi di thailand adalah bentuk *Promissory Coups*, indikator ini menggambarkan bahwa kemunduran demokrasi terjadi secara kudeta yang di klaim secara “sementara” untuk dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan negara dan menciptakan sistem demokrasi yang lebih transparan. Namun pada akhirnya sementara ini melahirkan kekuasaan non demokratis dalam negara dan mencederai sistem demokrasi karena membatasi berbagai hal yang seharusnya ada dalam negara demokrasi salah satunya adalah kebebasan pers.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua negara ini sama-sama mengalami adanya kemunduran demokrasi dari dalam sistem demokrasi itu sendiri melalui cara yang legal dan sah. keadaan atau kondisi kemunduran ini tentunya membawa kekhawatiran masyarakat dan juga mengakibatkan banyak sekali dampak negatif seperti adanya pembatasan partisipasi. sistem demokrasi merupakan bagian penting dalam negara yang menganut prinsip pemerintahan oleh rakyat. Namun yang terjadi saat ini demokrasi bukan lagi menjadi nilai yang dipegang teguh tapi justru menjadi paradoks besar dan hanya sebagai sistem formalitas biasa untuk meraih simpati masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ambarita, Y. D., Riadi, K. A., Inayasha, I., Sari, D. O., Gulo, S. S., Sari, P. D., ... & Annisa, S. (2025). Oligarki dan kemunduran demokrasi di Indonesia: Analisis tinjauan literatur. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 2(4), 7661–7671.
- Aspinall, E., & Warburton, E. (2017). Indonesia: The dangers of democratic regression. In *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)* (pp. 1–4). Atlantis Press.
- Azizzah, K. H. (2023). Analisis kemunduran demokrasi Indonesia berdasarkan tren pengukuran global dan domestik terkait kebebasan berpendapat tahun 2015–2020 (Doctoral dissertation, Universitas Bakrie).
- Bermeo, N. (2016). On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19.
- Budiatri, A. P., & Wiratraman, H. (Eds.). (2022). *Demokrasi tanpa demos: Refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.

- Carolinna, R. E., Rijal, N. K., & Adzmy, M. F. (2022). Thai protest 2020: Gagalnya sebuah upaya gerakan sosial melawan dominasi militer. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 153–166.
- Croissant, A., & Voelkel, J. H. (2020). Democratic regression in Asia: Theories and empirical patterns. *Democratization*, 27(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1641180>
- Djuyandi, Y., Delsita, T., Fahira, G., & Askhia, D. (2023). Hubungan sipil dan militer melalui dinamika kudeta militer di Thailand. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 2(3), 119–127.
- Dori, P., Kleden, F. B., & Jehalut, F. (2025). Kemunduran demokrasi di Indonesia dan gerakan untuk “Back to Nature” menurut perspektif Rousseau: The decline of democracy in Indonesia and the movement for “Back to Nature” according to Rousseau's perspective. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(2), 257–265.
- Harefa, E., Dompok, T., Harefa, R. T., & Salsabila, L. (2024, September). Perbandingan sistem politik dan demokrasi: Studi kasus Indonesia dan Filipina dalam konteks sejarah politik dan pemilihan umum. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK)* (Vol. 6, pp. 136–140).
- Harrison, A. T. (2022). Thailand: The return of authoritarianism. *PANDION: The Osprey Journal of Research and Ideas*, 3(1), 11.
- Jati, W. R. (2021). Fenomena kemunduran demokrasi Indonesia 2021. *The Habibie Center THC Insights*, 27(6).
- Lubis, S., & Zamharir, H. (2024). Politik pemerintahan Thailand era Thaksin Shinawatra & Malaysia era Anwar Ibrahim dalam perspektif illiberal democracy serta relevansinya dengan Indonesia. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2), 118–131.
- Nethipo, V., Montesano, M. J., Chong, T., & Xun, S. (2019). Thailand's politics of decentralization: Reform and resistance before and after the May 2014 coup. In *After the Coup: The National Council for Peace and Order Era and the Future of Thailand* (pp. 224–253).
- Ramadhan, M. F. S., & Masykuri, R. (2021). Kemunduran demokrasi dan kebebasan pers di Asia Tenggara: Refleksi dari enam negara. *Journal of Political Research*, 18(2), 141–157.
- Sihidi, I. T. (2025). The rise of symptoms of digital authoritarianism: Lesson from Indonesia. *International Journal of Politics and Public Policy*, 2(1), 186–201.
- Sofian, M., & Firman, F. (2025). Demokrasi deliberatif dalam perspektif hukum tata negara: Upaya mencegah kemunduran demokrasi Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(2), 209–223.
- Sombatpoonsiri, J. (2020). ‘Authoritarian civil society’: How anti-democracy activism shapes Thailand's autocracy. *Journal of Civil Society*, 16(4), 333–350.

Thompson, M. R. (2016). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in comparative perspective. *Pacific Affairs*, 89(4), 725–747.
<https://doi.org/10.5509/2016894725>